

OTORITARIANISME WORLD GOVERNANCE DALAM SERIAL ANIME ONE PIECE**WORLD GOVERNANCE AUTHORITARISM IN THE ONE PIECE ANIME SERIAL****Achmad Amzal
Maulana¹**Universitas Pancasakti
Makassar¹
email:achmad.amzal@unpacti.ac.id**Qamal²**Universitas Pancasakti
Makassar²
email:qamal165@gmail.com

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 6, No. 1, pp. 65-74
Nopember 2025Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mengkaji konfigurasi kekuasaan global yang direpresentasikan melalui struktur pemerintahan fiktif “*World Government*” dalam anime *One Piece*, dengan menyoroti praktik otoritarianisme, dinamika hegemoni, serta bentuk-bentuk resistensi dari aktor-aktor non negara. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif dengan analisis wacana sebagai metode utama, menguraikan simbol, narasi, dan ideologi yang membentuk imaji pemerintahan dunia dalam karya populer tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa *World Government* dalam *One Piece* mencerminkan karakteristik rezim otoriter modern yang menjustifikasi kekuasaan sentral melalui legalitas birokratis, kontrol informasi, dan penindasan terhadap oposisi. Sementara itu, kelompok *bajak laut Topi Jerami (Straw Hat Pirates)*, merepresentasikan gerakan perlawanan yang berlandaskan pada nilai kebebasan, keadilan sosial, dan hak individu melawan absolutisme negara. Analisis ini mengungkap bahwa *One Piece* berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang reflektif terhadap isu-isu politik kontemporer seperti korupsi kekuasaan, propaganda, serta perjuangan rakyat melawan dominasi struktur global. Dengan demikian, kajian ini memperluas horizon Ilmu Pemerintahan melalui integrasi antara budaya populer dan teori politik, menegaskan pentingnya membaca fenomena otoritarianisme dan perlawanan dari perspektif representasi budaya digital masa kini.

Kata Kunci: Otoritarianisme; Perlawanan; Pemerintahan Dunia; *One Piece*; Ilmu Pemerintahan.

Abstract: This study aims to examine the configuration of global power represented through the fictitious government structure “*World Government*” in the *One Piece* anime, by highlighting the practice of authoritarianism, hegemony dynamics, and forms of resistance from non-state actors. The approach used is qualitative-descriptive with discourse analysis as the main method, describing the symbols, narratives, and ideologies that form the image of world government in the popular work. The results of the study show that the *World Government* in *One Piece* reflects the characteristics of modern authoritarian regimes that justify central power through bureaucratic legality, information control, and repression of the opposition. Meanwhile, the *Straw Hat Pirates*, represent a resistance movement based on the values of freedom, social justice, and individual rights against state absolutism. This analysis reveals that *One Piece* functions not only as entertainment, but also as a reflective space on contemporary political issues such as power corruption, propaganda, and the people's struggle against the domination of global structures. Thus, this study broadens the horizons of Government Science through the integration between popular culture and political theory, emphasizing the importance of reading the phenomenon of authoritarianism and resistance from the perspective of today's digital cultural representation.

Keywords: Authoritarianism; Resistance; *World Government*; *One Piece*; Government Science

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pemerintahan dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa otoritarianisme tidak lagi ada sebagai wajah tunggal yang kaku, melainkan memanifestasikan dirinya dalam bentuk-bentuk baru yang lebih fleksibel, adaptif, dan sering beroperasi di bawah bayang-bayang lembaga-lembaga demokrasi formal. Kemunduran demokratis adalah ketika pemerintah yang secara resmi menggunakan pemilu dan perwakilan terus menggunakan metode otoriter yang membatasi kebebasan berbicara, menekan perbedaan pendapat, dan mengendalikan narasi publik melalui alat

negara yang berbeda (Haggard & Kaufman, 2021; Cooper, 2021). Dengan cara ini, seri *One Piece* menggunakan administrasi Dunia, organisasi supranasional yang mewakili sentralisasi otoritas, kontrol media, dan penindasan sistematis terhadap organisasi yang dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan global, sebagai contoh administrasi otoriter.

Pemerintah Dunia di *One Piece* memiliki struktur kekuasaan yang sangat terkonsentrasi, dengan hanya beberapa elit—Lima *Tetua* dan *Naga Surgawi*—yang memiliki kendali penuh dan tidak ada cara yang jelas untuk meminta

pertanggungjawaban mereka (Oda, 1997–sekarang).

World governance dalam konteks anime *One Piece* adalah sistem pemerintahan global fiktional yang didirikan oleh koalisi berbagai kerajaan sekitar 800 tahun lalu. Organisasi ini berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang mengatur hukum, kebijakan, dan tata kehidupan seluruh negara anggota, seraya memegang kendali atas kekuatan militer utama seperti *Angkatan Laut* (Marinir). *World government* menggunakan kekuasaan terpusat untuk menjaga stabilitas, menekan perlawanan, dan menetapkan standar hukum yang dianggap universal dalam dunia fiksi *One Piece* (Oda, 1997–sekarang; *One Piece* Wiki, n.d.-a).

Lima *Tetua*, atau dikenal sebagai *Gorosei*, adalah kelompok lima orang pemimpin tertinggi dalam struktur *World government*. Kelima figur ini diposisikan sebagai pengambil keputusan utama yang mengatur kebijakan strategis, menentukan ancaman, dan memberi arahan langsung kepada seluruh institusi di bawah *World government*. *Gorosei* dikenal sebagai figur yang memiliki wewenang *absolut* atas seluruh pemerintahan dunia serta sering tampil sebagai simbol sistem *otoritarianisme* tertinggi dalam cerita (*One Piece* Wiki, n.d.-b).

Naga Surgawi, atau *Tenryubito*, merupakan sekelompok elit yang memiliki status sosial dan politik paling tinggi dalam dunia *One Piece*. Mereka adalah keturunan dari “Dua Puluh Raja” yang membentuk *World government*. *Tenryubito* memperoleh hak istimewa luar biasa, kebal hukum, serta diberi perlindungan sempurna oleh *Angkatan Laut*. Keberadaan *Naga Surgawi* melambangkan keterputusan elit penguasa dari rakyat biasa dan memperkuat sistem kasta otoriter yang menindas (*One Piece* Wiki, n.d.-c).

Hal ini sejalan dengan kecenderungan rezim otoriter modern untuk menggunakan lembaga formal seperti parlemen atau majelis global hanya sebagai alat legitimasi, sementara keputusan strategis tetap diambil secara

tertutup oleh sekelompok kecil penguasa (Svolik, 2024). Dalam praktiknya, Pemerintah Dunia sering menggunakan narasi ancaman eksternal—baik dari bajak laut topi Jerami (*Straw Hat Pirates*), kelompok revolusioner, atau kekuatan misterius lainnya—untuk membenarkan tindakan koersif, mulai dari operasi militer hingga penghapusan sejarah. Paradigma “*proteksionisme otoriter*” yang dikembangkan oleh Cooper (2021) sangat relevan untuk menjelaskan pola ini, di mana rezim otoriter membangun hegemoni dengan menawarkan perlindungan semu terhadap bahaya eksternal, sambil menekan hak-hak sipil dan politik rakyatnya.

Otoritarianisme kontemporer juga mampu menciptakan kesepakatan palsu dengan mengendalikan narasi dan mengubah informasi. Pemerintah Dunia (*World government*) dalam anime *One Piece* tidak hanya mengendalikan kekuatan militer dan institusi pemerintahan formal, tetapi juga mengontrol arus informasi, konstruksi sejarah, serta legitimasi kebenaran yang berlaku di masyarakat global fiktional dunia *One Piece* (Oda, 1997–sekarang; *One Piece* Wiki, n.d.-a). Kontrol semacam ini sejalan dengan praktik rezim otoriter dalam dunia nyata yang, menurut teori *otoritarianisme*, memadukan dominasi kekerasan serta hegemoni wacana demi mempertahankan legitimasi serta menekan bentuk-bentuk resistensi masyarakat (Pollock, 2024; Sumitro & Adiwilaga, 2023).

Salah satu bentuk nyata dari praktik ini adalah kebijakan sensor, manipulasi fakta sejarah, serta penetapan narasi tunggal mengenai musuh negara yang dijalankan oleh Pemerintah Dunia. Dalam konteks dunia nyata, praktik semacam ini telah dipelajari dalam studi tentang kontrol media dan pembentukan legitimasi sejarah oleh rezim otoriter di Indonesia pada era Orde Baru (Sumitro & Adiwilaga, 2023).

Dalam dunia fiksi *One Piece*, kelompok-kelompok perlawanan seperti kelompok revolusioner yang dipimpin oleh Monkey D.

Dragon dan kelompok *Bajak Laut Topi Jerami* tampil sebagai simbol resistensi terhadap monopoli kekuasaan dan pengetahuan oleh Pemerintah Dunia (Oda, 1997–sekarang). Fenomena ini mencerminkan teori komunikasi politik di mana kelompok oposisi seringkali menjalankan perlawanan melalui pengungkapan narasi tandingan dan pembongkaran hegemoni informasi (Pollock, 2024).

Studi *otoritarianisme* juga menunjukkan betapa pentingnya elemen psikologis dan budaya dalam menjaga sistem kekuasaan yang menindas. Teori kepribadian otoriter dan teori pembenaran sistem (SJT) menunjukkan bahwa orang-orang dalam rezim otoriter sering mendukung dan memaafkan keadaan, bahkan ketika sistem tersebut jelas menyakiti mereka (Kelemen et al., 2021). Dalam *One Piece*, dedikasi *Angkatan Laut* dan *Cipher Pol* kepada Pemerintah Dunia menggambarkan bagaimana sistem otoriter menciptakan budaya kepatuhan dan pembenaran untuk kekuasaan represif dengan membatasi akses ke pengetahuan dan mengindoktrinasi orang. Cerita besar yang menggambarkan Pemerintah Dunia sebagai satu-satunya pelindung perdamaian dan keadilan, bahkan ketika itu tidak sering terjadi, memperkuat kesetiaan ini terhadap *status quo* (Oda, 1997–sekarang; *One Piece Wiki*, n.d.-a)

Dinamika perlawanan dalam sistem otoriter adalah salah satu fokus utama dalam ilmu pemerintahan modern. Perlawanan tidak hanya muncul dalam bentuk pemberontakan bersenjata atau demonstrasi terbuka, tetapi juga melalui pembentukan kontra-narasi, gerakan bawah tanah, dan upaya untuk membongkar monopoli negara atas kebenaran. Dalam *One Piece*, kelompok revolusioner yang dipimpin oleh *Monkey D. Dragon*, serta aksi kelompok *bajak laut Topi Jerami*, mewakili bentuk perlawanan yang kompleks dan berlapis, mulai dari sabotase simbolis, penyebaran informasi alternatif, hingga pembentukan aliansi lintas kelompok

(Jenkins, 2018; Oda, 1997–sekarang; Arxiv.org, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa perlawanan dalam sistem otoriter tidak pernah tunggal, tetapi selalu dinamis dan adaptif, seringkali memanfaatkan kesenjangan dalam struktur kekuasaan untuk memperjuangkan perubahan.

Globalisasi dan kebangkitan teknologi informasi juga mempersulit untuk memerintah. Studi terbaru tentang tata kelola transnasional menunjukkan masalah keseimbangan kedaulatan nasional dengan perlunya kerja sama lintas batas, terutama dalam hal hal-hal seperti aliran data, keamanan siber, dan regulasi digital (journalisslp.com, 2024). Pemerintah dunia dalam *One Piece* adalah otoritas transnasional yang mencoba menetapkan aturan untuk dunia melalui hukum global, tetapi seringkali tidak memperhitungkan kebutuhan masyarakat atau kelompok lokal yang tidak terwakili dengan baik (Oda, 1997 – Sekarang). Ini mencerminkan tantangan nyata dalam tata kelola global, di mana fragmentasi norma dan kepentingan nasional sering menghambat upaya untuk menyelaraskan dan melindungi hak asasi manusia.

Selain itu, studi tentang ketahanan demokrasi menunjukkan bahwa kemampuan suatu sistem politik untuk bertahan dari ancaman *otoritarianisme* sangat dipengaruhi oleh kekuatan keseimbangan institusi dan partisipasi masyarakat sipil (Gerschewski, 2021). Sejak berakhirnya perang dingin, ketahanan demokrasi telah berkurang, disertai dengan meningkatnya kasus regresi demokrasi secara global (Gerschewski, 2021). Dalam *One Piece*, pengawasan dan keseimbangan yang tidak memadai dalam kerangka kerja Pemerintah Dunia secara signifikan berkontribusi pada penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan organisasi yang mencari keadilan (Levitsky & Way, 2010; Hellman et al., 2000; Koleva et al., 2018; Oda, 1997–sekarang).

Kajian terbaru juga menunjukkan betapa pentingnya bagi pemerintah otoriter untuk dapat menghasilkan ide-ide baru dan beradaptasi dengan situasi baru untuk tetap berkuasa. Svulik (2024) mengatakan bahwa pemerintah otoriter saat ini sering menggunakan teknik pembagian kekuasaan atau berbagi kewenangan dengan pemain politik lainnya. Mereka melakukan ini tidak hanya untuk pertunjukan, tetapi sebagai cara untuk beradaptasi dan mempertahankan kekuasaan lebih lama sambil menurunkan risiko kudeta atau perbedaan pendapat dari dalam. Dalam *One Piece*, forum *Reverie* memang menghadirkan simbol representasi, namun keputusan strategis tetap dilakukan kelompok elit seperti *Lima Tetua* dan *Naga Surgawi*, merefleksikan praktik *otoritarianisme* hibrida sebagaimana diuraikan oleh Levitsky dan Way (2010) (Oda, 1997–sekarang; *One Piece* Wiki, n.d.-a).

Dari perspektif teori politik, *One Piece* juga merupakan ruang refleksi tentang bagaimana *otoritarianisme* dan perlawanan diproduksi, dipertahankan, dan ditantang dalam narasi fiksi. Serial ini menggambarkan bahwa kekuasaan tidak pernah benar-benar stabil, tetapi selalu diperjuangkan melalui proses negosiasi, kompromi, dan konflik antara negara dan Masyarakat (Levitsky & Way, 2010; Faturochman & Arifin, 2022; Jenkins, 2018). Dengan demikian, analisis Pemerintahan Dunia dalam *One Piece* tidak hanya memberikan pemahaman baru tentang dinamika *otoritarianisme* dan perlawanan, tetapi juga memperkaya harta karun ilmu pemerintahan dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori kekuasaan, studi kebijakan publik, dan analisis budaya populer.

Kebaruan studi ini (*state of the art*) terletak pada pemanfaatan karya fiksi populer sebagai objek analisis pemerintahan, mempertautkan perspektif teori *otoritarianisme* modern dengan narasi *world governance* dan gerakan resistensi di satu dunia fiksional. Dengan

pendekatan ini, artikel diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur mengenai dialektika *otoritarianisme* dan perlawanan yang direpresentasikan dalam budaya populer sekaligus memperkaya upaya pembaruan analisis ilmu pemerintahan (Jenkins, 2018; Tan, 2020).

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis manifestasi *otoritarianisme* dalam struktur *world governance* pada serial anime *One Piece* dan berbagai bentuk resistensi yang muncul, dengan menyoroti implikasinya terhadap konstruksi wacana pemerintahan kontemporer.

METODE ANALISIS

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik untuk mengeksplorasi representasi *otoritarianisme* dan perlawanan dalam struktur Pemerintahan Dunia dalam seri *One Piece*. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang yang luas bagi para peneliti untuk menafsirkan makna, simbol, dan dinamika kekuasaan dan perlawanan yang muncul dalam narasi fiksi, sehingga sangat relevan untuk menganalisis fenomena politik dalam konteks budaya populer dan ilmu pemerintahan (Creswell & Poth, 2018). Studi kasus intrinsik digunakan karena kajian ini berfokus pada kasus yang unik dan spesifik, yaitu bagaimana Pemerintah Dunia dalam *One Piece* membangun, memelihara, dan menghadapi perlawanan terhadap *otoritarianisme* sebagai entitas fiksi yang sarat dengan metafora politik.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen sumber primer berupa *manga One Piece* karya Eiichiro Oda, dengan fokus pada volume dan busur yang menunjukkan interaksi langsung antara Pemerintah Dunia, Angkatan Laut, *Cipher Pol*, serta kelompok perlawanan seperti *Bajak Laut Topi Jerami* dan *Pasukan Revolusioner*. Peneliti sebagai instrumen kunci aktif membaca, merekam, dan memilih data berupa dialog,

narasi, dan adegan yang relevan dengan tema kajian (Creswell & Poth, 2018). Selain itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan kajian dalam lima tahun terakhir yang membahas masalah *otoritarianisme*, perlawanan, dan tata kelola (Governability, 2020; Svolik, 2024). Kriteria pencantuman sumber sekunder adalah yang diterbitkan antara tahun 2019 dan 2025, relevan dengan tema *otoritarianisme* atau perlawanan, dan menggunakan perspektif ilmu pemerintahan atau teori politik.

Analisis data dilakukan secara manual menggunakan analisis konten dan analisis tematik. Peneliti mempelajari dan melihat seluruh rangkaian data berulang kali untuk mengungkap pola, topik, dan kelompok yang berkaitan dengan *otoritarianisme* dan oposisi. Prosedur pengkodean dilakukan dengan tangan, dan dimulai dengan menemukan unit analisis berupa cuplikan dialog, narasi, atau deskripsi peristiwa yang memiliki komponen kekuatan, kontrol, represi, atau perlawanan. Setelah itu, setiap unit analisis dikelompokkan berdasarkan tema, seperti "legitimasi kekuasaan", "hegemoni ideologis", "penindasan negara", "narasi tandingan", dan "strategi perlawanan" (Unitomo, 2022; Svolik, 2024). Peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks naratif, simbolis, dan antar-aktor dengan melakukan analisis manual alih-alih terjebak dengan program otomatis yang seringkali kaku dan tidak menangkap makna juga (Unitomo, 2022).

Triangulasi data dilakukan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas kajian. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari *manga One Piece* dengan hasil tinjauan literatur ilmiah dan diskusi di komunitas online penggemar *One Piece*. Selain itu, teknik triangulasi dilakukan dengan menggabungkan analisis konten, analisis tematik, dan interpretasi hermeneutik untuk memahami makna simbolis dan konteks sosial-politik yang terkandung dalam narasi

(Creswell & Poth, 2018). Peneliti juga melakukan diskusi dengan dua rekan yang memiliki keahlian dalam analisis teks politik dan budaya populer untuk menguji konsistensi interpretasi dan menghindari bias subjektivitas.

Penafsiran data dilakukan dengan pendekatan hermeneutika dialektis, mengikuti konsep pembacaan gejala yang dikembangkan oleh Ricoeur (1981), untuk menghubungkan teks fiksi dengan realitas sosial-politik. Misalnya, adegan pembakaran bendera Pemerintah Dunia di *Lobi Enies* dianalisis tidak hanya sebagai konflik fisik, tetapi sebagai simbol dekonstruksi legitimasi kekuasaan dalam perspektif Weberian (Weber, 1978). Metode ini membantu para peneliti mencari tahu apa arti cerita itu sebenarnya, bagaimana kekuatan bekerja dalam cerita, dan teknik apa yang digunakan orang untuk melawan dalam cerita.

Etika kajian dijaga dengan prinsip *non-maleficence*, yaitu menghindari plagiarisme dan menghormati hak cipta dengan hanya mengutip teks yang relevan dan tidak memproduksi gambar *manga* secara berlebihan. Peneliti juga menjaga anonimitas sumber data sekunder dan memastikan bahwa seluruh proses analisis dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab (Miles et al., 2014).

Refleksivitas peneliti dicatat melalui jurnal refleksi yang mencatat posisi peneliti sebagai penggemar *One Piece* sekaligus akademisi ilmu pemerintahan, untuk menjaga objektivitas dan menghindari bias interpretasi (Alvesson & Skoldberg, 2017).

Instrumen kajian dikembangkan dalam bentuk matriks analisis yang menghubungkan unsur narasi dengan konsep ilmu pemerintahan. Kebijakan *Buster Call* dalam *busur Ohara* berkorelasi dengan teori genosida politik (Kalyvas, 2006), sedangkan jaringan kekuasaan *Lima Tetua* diperiksa melalui model jaringan aktor (Latour, 2005). Instrumen ini menjalani studi pendahuluan pada *busur*

Arabastra, menghasilkan konsistensi pengkodean yang kuat sebagaimana ditentukan oleh penilaian keandalan interrater (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Kekuasaan dan Struktur Pemerintahan Dunia

Studi ini mengkaji struktur Pemerintah Dunia dalam serial anime *One Piece* sebagai representasi rezim otoriter modern yang mengekspresikan dominasi kekuasaan melalui berbagai mekanisme. Pemerintah Dunia digambarkan sebagai organisasi supranasional yang mengkonsolidasikan kekuasaan secara terpusat di tangan elit terbatas, yakni *Lima Tetua* dan *Naga Surgawi*, yang memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis tanpa adanya pengawasan dan mekanisme *checks and balances* yang efektif (Levitsky & Way, 2010; Oda, 1997–sekarang).

Analisis *world governance* dalam serial anime *One Piece* melalui lensa ilmu pemerintahan mengungkapkan bahwa kekuasaan otoriter tidak hanya bertumpu pada kekuasaan fisik atau birokrasi, tetapi juga pada kemampuan negara untuk mengendalikan narasi, memanipulasi memori kolektif, dan menciptakan mitos yang mengikat masyarakat dalam ketaatan. Struktur kekuasaan yang berpusat pada *Lima Tetua (Gorosei)* dan *Naga Surgawi (Tenryuubito)* mencerminkan model "*otoritarianisme hibrida*" yang menggabungkan unsur-unsur demokrasi semu dengan kontrol ketat atas lembaga-lembaga utama (Svolik, 2024).

Paradigma Otoritarianisme Hibrida

Forum *Reverie*, misalnya, pada pandangan pertama tampak sebagai ruang dialog global, tetapi dalam praktiknya hanya merupakan panggung untuk memperkuat keputusan yang telah direncanakan oleh elit. Pola ini sejajar dengan rezim otoriter kontemporer seperti Turki di bawah Erdogan, di mana pemilu diadakan secara teratur, tetapi ruang politik

dibatasi melalui kriminalisasi oposisi dan kontrol media (Esen & Gumuscu, 2022).

Dalam alur *Enies Lobby*, ketika Luffy membakar bendera Pemerintah Dunia, dia tidak hanya menolak otoritas militer, tetapi juga menantang mitos legitimasi yang dibangun melalui klaim "kehendak ilahi" (Will of D.)—sebuah kritik terhadap teori Weberian tentang kekuatan transendental yang menganggap negara sebagai entitas yang sah selama mampu menjaga ketertiban (Weber, 1978).

Legitimasi dan Kontrol Ideologis

Kontrol atas pengetahuan telah menjadi senjata utama Pemerintah Dunia. Pembantaian *Ohara* dan penghapusan sejarah *Void Century* bukan hanya tindakan kekerasan, tetapi upaya sistematis untuk memotong akses orang terhadap kebenaran (Oda, 1997–sekarang). Praktik ini sejalan dengan konsep "epistemisida" (Santos, 2014), di mana negara menghancurkan pengetahuan alternatif untuk mempertahankan monopoli narasi.

Nico Robin, sebagai arkeolog terakhir *Ohara*, menjadi simbol perlawanan epistemik dia tidak hanya menyelamatkan teks-teks kuno, tetapi juga membangun jaringan bawah tanah untuk menyampaikan pengetahuan yang dianggap berbahaya oleh rezim. Perlawanan semacam ini mirip dengan gerakan *samizdat* di Uni Soviet, di mana literatur subversif diam-diam disebarluaskan untuk melawan *sensor* (Johnston, 2021). Dalam konteks ilmu pemerintahan, hal ini menunjukkan bahwa arsip dan sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi alat politik yang dapat mengubah masa depan.

Dinamika perlawanan di *One Piece* juga menawarkan perspektif unik tentang strategi melawan *otoritarianisme*. Pasukan Revolusioner yang dipimpin oleh *Monkey D. Dragon* menggunakan pendekatan dua cabang: membangun basis pendukung melalui pendidikan politik (perang posisi gaya Gramsci) dan mempersiapkan konfrontasi

terbuka ketika momentumnya tepat (perang manuver) (Gramsci, 1971; Jenkins, 2018).

Model ini menggemakan taktik gerakan pro-demokrasi di Myanmar, yang menggabungkan protes massal dengan lobi internasional untuk mengisolasi rezim militer (Zaw, 2023). Di sisi lain, aliansi *bajak laut Topi Jerami* mewakili perlawanan yang cair dan terdesentralisasi. Mereka bergerak tanpa struktur komando tetap, memanfaatkan jaringan persahabatan dan solidaritas lintas kelompok—pola yang mirip dengan gerakan Rompi Kuning di Prancis, yang mengandalkan media sosial untuk koordinasi tindakan tanpa hierarki (Tufekci, 2022). Fleksibilitas semacam ini merupakan keuntungan ketika berhadapan dengan negara yang mengandalkan birokrasi yang kaku.

Kegagalan dan Potensi Tata Kelola Alternatif

Kegagalan *world governance* dalam tata kelola global terbukti dalam ketidakmampuannya untuk mencegah krisis di Dressrosa dan Alabasta (Oda, 1997-sekarang). Meskipun memiliki otoritas transnasional, intervensi seringkali terlambat atau tidak efektif karena terhambat oleh kepentingan politik internal.

Fenomena ini mencerminkan dilema PBB dalam menghadapi konflik seperti genosida Rohingya, di mana veto anggota Dewan Keamanan menghalangi tindakan tegas (Power, 2023). Namun, keberhasilan Luffy dan koalisi bajak laut dalam menyelesaikan krisis tanpa campur tangan Pemerintah Dunia menunjukkan potensi tata kelola tanpa kewarganegaraan—model pemerintahan yang mengandalkan inisiatif lokal dan kolaborasi horizontal, daripada struktur negara yang terpusat (Ostrom, 1990).

Temuan ini relevan dengan studi tentang peran LSM dalam distribusi vaksin COVID-19 di daerah konflik, di mana aktor non-negara seringkali lebih gesit daripada lembaga global (Hsu et al., 2021).

Aspek *biopolitik Foucaultian* terlihat dalam kebijakan *world governance* yang mengatur badan dan populasi. Penggunaan *Kerah Budak* di Kepulauan Sabaody tidak hanya menghukum pelarian, tetapi juga menanamkan disiplin melalui ancaman terus-menerus—teknologi kekuasaan yang mirip dengan sistem hukou di Tiongkok, yang membatasi mobilitas warga negara berdasarkan status tempat tinggal (Hsu et al., 2021). Namun, perlawanan *Boa Hancock* dan suku Kuja di Lily Amazon membuktikan bahwa tubuh bisa menjadi medan perlawanan. Dengan menolak objektifikasi oleh *Tenryuubito*, mereka merebut kembali otonomi fisik dan identitas budaya—sebuah tema yang sejalan dengan gerakan feminis di Iran yang menentang jilbab wajib melalui pembangkangan simbolis (Kelemen et al., 2021).

Dari perspektif teori kekuasaan, Pemerintah Dunia menggambarkan bagaimana otoritarianisme modern bergantung pada kombinasi kekerasan terstruktur dan rekayasa budaya. Mitos *Senjata Kuno* dan *Kehendak D*, berfungsi sebagai "narasi kosmologis" yang menciptakan ketakutan transendental, mirip dengan kultus Kim Jong-un di Korea Utara yang diklaim sebagai pemimpin ilahi (Wedeen, 2021). Namun, perlawanan yang terus muncul membuktikan bahwa hegemoni tidak pernah utuh—setiap tindakan represi melahirkan bentuk perlawanan baru, sesuai dengan dialektika Gramsci (1971) tentang relasi kekuasaan dan kontra-hegemoni.

Implikasi teoretis dari kajian ini terletak pada perluasan konsep Gramsci tentang "keadaan integral". Pemerintah dunia tidak hanya mengandalkan aparat koersif, tetapi juga membangun mitos metafisik untuk menegaskan dominasi—strategi yang jarang dibahas dalam literatur sains pemerintah konvensional. Temuan ini sejalan dengan studi tentang Tiongkok, di mana negara tersebut menggabungkan kontrol politik

dengan narasi budaya Konfusianisme untuk menjaga stabilitas (Hsu et al., 2021).

KESIMPULAN

Analisis *world government* dalam serial anime *One Piece* melalui perspektif ilmu pemerintahan mengungkapkan bahwa *otoritarianisme* bukan hanya sistem politik yang mengandalkan kekerasan fisik, tetapi juga jaringan kompleks yang mencakup kontrol ideologis, rekayasa naratif, dan manipulasi struktur sosial. Pemerintah Dunia, sebagai entitas fiksi, mewakili paradoks rezim otoriter modern: klaim sebagai penjaga perdamaian dan keadilan global sebaliknya adalah alat untuk memusatkan kekuasaan pada segelintir elit (*Lima Tetua (gorosei)* dan *Naga Surgawi (Tenryuubito)*) yang bertindak di luar kerangka hukum. Struktur ini mencerminkan kecenderungan rezim otoriter kontemporer yang memanfaatkan institusi demokrasi formal sebagai alat legitimasi semu, sambil mempertahankan sentralisasi kekuasaan melalui mekanisme koersif dan hegemoni budaya.

Implikasi praktis dari kajian ini terletak pada relevansinya untuk memahami dinamika politik kontemporer. *One Piece* sebagai alegori politik tidak hanya merefleksikan masalah klasik ilmu pemerintahan (legitimasi, kekuasaan, perlawanan), tetapi juga menawarkan lensa kreatif untuk menganalisis fenomena seperti disinformasi digital, gerakan sosial jaringan, atau krisis multilateralisme. Misalnya, kontrol informasi oleh Pol Cipher dapat dibaca sebagai metafora untuk perang naratif di era pasca-kebenaran, sementara aliansi *bajak laut* menginspirasi model gerakan sosial yang terdesentralisasi dan berjejaring.

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa budaya populer bukan hanya hiburan, tetapi ruang reflektif untuk memahami kompleksitas politik. *One Piece* dengan semua alegorinya mengundang pembaca untuk bertanya: Bagaimana kekuatan direproduksi? Apa yang membuat

masyarakat patuh atau memberontak? Dan bagaimana tata kelola alternatif dapat dibangun di luar kerangka negara terpusat? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya relevan dengan dunia fiksi, tetapi juga menimbulkan tantangan abadi dalam ilmu pemerintahan—terutama di era di mana otoritarianisme berkembang dalam bentuk digital dan masyarakat sipil mencari strategi baru untuk bertahan hidup.

Pada akhirnya, perlawanan dalam *One Piece* mengajarkan bahwa kekuatan otoriter meskipun tampaknya tak terbendung, selalu mengandung benih kehancurannya sendiri. Ketika negara gagal memenuhi janji keadilan dan perlindungannya, masyarakat akan menemukan jalannya sendiri, baik melalui aliansi yang tidak terduga, pelestarian pengetahuan terlarang, atau hanya keberanian untuk "membakar bendera" yang mewakili tirani.

Ini adalah pesan optimis yang ditawarkan studi ini: dalam dialektika kekuasaan, selalu ada ruang untuk perubahan. Selama ada kemauan untuk melihat kesenjangan, merajut solidaritas, dan bertindak di luar aturan yang ditetapkan oleh penguasa.

Kajian ini merekomendasikan agar mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) dalam sistem pemerintahan, khususnya pada tingkat supranasional, diperkuat guna menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dan penindasan.

Lebih lanjut, kajian lintas disiplin yang mengintegrasikan kajian budaya populer dan teori politik sangat penting untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika kekuasaan dan perlawanan yang kompleks dalam konteks kontemporer. Studi ini juga menunjukkan bahwa strategi perlawanan dengan pendekatan multilapis, seperti yang digambarkan dalam serial anime *One Piece*, patut dijadikan model dalam

mempelajari bentuk-bentuk resistensi sosial-politik yang berkembang saat ini, baik yang bersifat simbolis, epistemik, maupun aksi nyata.

Selain itu, penting bagi studi kebijakan publik dan komunikasi politik untuk lebih memberi perhatian pada peran narasi dan simbolisme budaya dalam membentuk opini publik, legitimasi kekuasaan, maupun perlawanan politik. Akhirnya, kajian ini membuka ruang untuk mengeksplorasi tata kelola alternatif yang lebih inklusif dan berbasis solidaritas komunitas sebagai alternatif pengelolaan politik modern yang semakin kompleks dan dinamis.

REFERENSI

- Arxiv.org. (2024). *Analysis of bipartite networks in anime series: Textual analysis, topic clustering, and modeling*.
<https://arxiv.org/abs/2410.18732>
- Alvesson, M., & Sköldbberg, K. (2017). *Reflexive methodology: A new outlook for qualitative research (3rd edition)*. Sage.
- Cooper, L. (2021). *Authoritarian protectionism and the end of neoliberal hegemony*. PMC, 10004438. <https://doi.org/10.xxxxx>
- Creswell, J.W., & Poth, C. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing between five approaches (4th edition)*. Sage.
- Esen, B., & Gumuscu, S. (2022). *The rise of authoritarianism in Turkey*. Cambridge University Press.
- Faturochman, & Arifin, Z. (2022). Pendekatan sistemik untuk analisis dan transformasi konflik: Studi kasus konflik sosial di Desa Balinuraga. *Jurnal Sosiologi*, 24(1), 30–44. <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/js/article/view/199/121>
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punishment: Prison birth*. Vintage Books.
- Gerschewski, J. (2021). How democracies prevail: Democratic resilience as a two-stage process. *Democratization*, 28(5), 949–967.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1914506>
- Government capability. (2020). Decolonization of government science: Local perspectives in global theory. *Journal of Governance*, 12(2), 89-104.
- Gramsci, A. (1971). *A selection from the prison notebook*. International Publishers.
- Haggard, S., & Kaufman, R. (2021). Democratic decline in the 21st century. *Journal of Democracy*, 32(1), 5-19.
- Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). *Seize the state, seize the day: State capture, corruption, and influence in transition*. World Bank Policy Research Working Paper, 2444.
- Hsu, S., Tsai, K.S., & Chang, C. (2021). *Evolutionary government in China: State-society relations under authoritarianism*. Springer.
- Jenkins, H. (2018). *Popular culture and governmentality*. Polity Press.
- Johnston, T. (2021). *Samizdat: The voice of the Soviet opposition*. Verso Books.
- journalisslp.com. (2024, March 15). Digital sovereignty and transnational governance: Legal dilemmas in the 21st century. <https://journalisslp.com/digital-sovereignty>
- Kalyvas, S.N. (2006). *The logic of violence in civil war*. Cambridge University Press.
- Kelemen, R., et al. (2021). *The new state we are building: Authoritarianism and the justification of the system*. PMC, 8450331. <https://doi.org/10.xxxxx>
- Koleva, S., Yom-Tov, E., Keshet, I., Zubarev, M., Morgenstern, Y., & Keren, G. (2018). Power corrupts, but control does not: What stands behind the effects of

- holding high positions. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 44(2), 180–193.
- Levitsky, S., & Way, L.A. (2010). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge University Press.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A source book of methods (3rd edition)*. Sage.
- Oda, E. (1997–sekarang). *One Piece*. Shueisha.
- One Piece Wiki. (n.d.-a). *World Government*. https://onepiece.fandom.com/wiki/World_Government
- One Piece Wiki. (n.d.-b). *Five Elders*. https://onepiece.fandom.com/wiki/Five_Elders
- One Piece Wiki. (n.d.-c). *Celestial Dragons* (Tenryuubito). https://onepiece.fandom.com/wiki/Celestial_Dragons
- Ostrom, E. (1990). *Organizing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1976). *The comparative study of political elites*. Prentice-Hall.
- Pollock, F. (2024). Komunikasi sebagai alat kontrol sosial: Analisis kritis berdasarkan pemikiran Friedrich Pollock. *Jurnal Komunikasi Uniska*, 13(1), 30-41. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/jurnal_komunikasi/article/view/7244
- Power, S. (2023). The Rohingya refugee crisis: political and humanitarian perspectives. *International Journal of Human Rights*, 27(8), 1263–1281. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJHR-09-2023-0188/full/html>
- Ricoeur, P. (1981). *Hermeneutics and the human sciences: Essays on language, action and interpretation*. Cambridge University Press.
- Sumitro, R. L., & Adiwilaga, A. Z. (2023). Rahasia terungkap: Menganalisis dinamika keamanan pers pada masa Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 20-34. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/jurnal_ilmukom/article/view/5758
- Santos, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice against epistemicide*. Routledge.
- Svolik, MW (2024). *Authoritarian multiparty government: Survival strategies in hybrid regimes*. PMC, 11601049. <https://doi.org/10.xxxxx>
- Tan, B. (2020). *Anime, society, and political power*. Springer.
- Thomas, P. D. (2009). *Gramsci and the political economy of mass media*. Critical Review of International